

**PENGARUH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**CICI SABU
E1119126**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
GORONTALO
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PENGARUH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

**CICI SABU
E1119126**

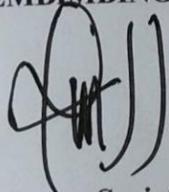
SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana

dan Telah di Setujui Oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal

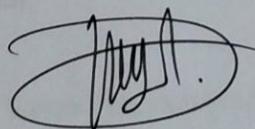
Gorontalo, 16 Juni 2022

PEMBIMBING I



Purnama Sari, SE., M.Si
NIDN : 09 120788 02

PEMBIMBING II



Agus Baku, SE., M.Si
NIDN : 09 010886 01

HALAMAN PERSETUJUAN

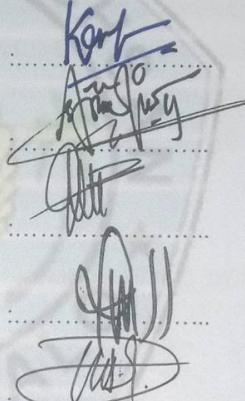
**PENGARUH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh

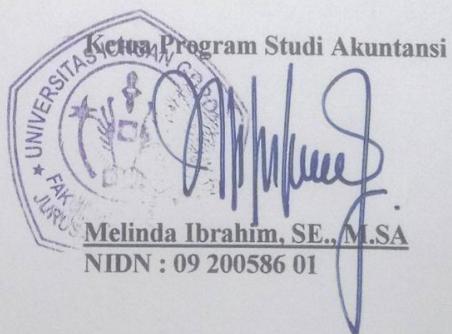
CICI SABU
E1119126

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. **Kartini Muslimin, SE., M.Ak**
(Ketua Penguji)
2. **Sulfianty, SE., M.Si**
(Anggota Penguji)
3. **Taufik Udango, SE., M.Ak**
(Anggota Penguji)
4. **Purnama Sari, SE., M.Si**
(Pembimbing Utama)
5. **Agus Baku, SE., M.Si**
(Pembimbing Pendamping)



Mengetahui,



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan secara acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Gorontalo, 17 Juni 2022
Yang Membuat Pernyataan



Cici Sabu
E1119126

ABSTRACT

CICI SABU. E1119126. THE EFFECT OF BUDGETARY ACCOUNTABILITY ON THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY AT THE REGIONAL FINANCE AGENCY OF POHuwato REGENCY

The study aims to determine to what extent the effect of Budgetary Accountability on Performance Accountability at the Regional Finance Agency of Pohuwato Regency. The method used in this study is a survey research approach. It employs a questionnaire with a simple regression analysis tool. The results of this study indicate that budgetary accountability (X) has a positive and significant effect on performance accountability at the Regional Finance Agency of Pohuwato Regency.

Keywords: budget accountability, performance accountability

ABSTRAK

CICI SABU. E1119126. PENGARUH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu melalui pendekatan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner dengan alat analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: pertanggungjawaban anggaran, akuntabilitas kinerja

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil Alamin atas limpahan rahmat dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul "**Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato**". Skripsi ini disusun sebagai salah syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.

Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa semua ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, bantuan, dan dukungan serta do'a dari kedua orang tua saya dan berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan rasa hormat yang setinggi tingginya kepada Ibu Purnama Sari, SE.,M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Agus Baku SE.,M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi tingginya kepada:

- Ibu Dr. Juriko Abdussamad, M.Si selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo (YPIPT-IG)
- Bapak Dr. H Abdul Gaffar Latjokke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
- Bapak Dr. Musafir, SE.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo.
- Ibu Melinda Ibrahim, SE.,M.SA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo.
- Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo yang telah mendidik dan mengarahkan penulis.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, masih diperlukan perbaikan dan penyempurnaan selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

Gorontalo, 17 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN	iv
<i>ABSTRAK</i>	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1. Maksud Penelitian	5
1.3.2. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Konsep Anggaran	7
2.1.1. Kegunaan Anggaran	10
2.1.2.Karakteristik Anggaran	11
2.1.3. Manfaat dan Tujuan Anggaran	12
2.1.4. Keunggulan dan Kelemahan Anggaran	13
2.1.5. Jenis-Jenis Anggaran	14
2.2. Konsep Kinerja	16
2.3. Konsep Anggaran Berbasis Kinerja.....	17
2.4. Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah	26
2.5. Kerangka Pemikiran	31

2.6. Hipotesis.....	32
BAB III OBJEK DAN METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1. Obyek Penelitian.....	33
3.2. Metodologi Penelitian.....	33
3.2.1. Desain penelitian.....	33
3.2.2. Definisi dan Operasional Variabel	33
3.2.3. Teknik pengumpulan data	36
3.2.4. Jenis dan Sumber Data	37
3.2.5. Populasi	38
3.3. Metode Analisis	38
3.4. Pengujian Hipotesis	39
3.4.1. Pengujian Hipotesis secara Parsial	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan	42
4.2.1. Tanggapan Responden pada Variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X)	43
4.2.2. Tanggapan Responden pada Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)	46
4.3. Analisis Data dan Pengujian Hipotesis	48
4.3.1. Analisis Data.....	48
4.3.2. Uji Signifikansi Persial (Uji-t).....	50
BAB V PENUTUP.....	52
5.1. Kesimpulan.....	52
5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
JADWAL PENELITIAN	55

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Operasionalisasi Variabel	35
Tabel 3.2. Bobot Alternatif Skala Likert	36
Tabel 4.2. Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item.....	42
Tabel 4.2. Indikator Jawaban Responden (x11)	43
Tabel 4.3. Indikator Jawaban Responden (x12)	43
Tabel 4.4. Indikator Jawaban Responden (x13)	44
Tabel 4.5. Indikator Jawaban Responden (x14)	44
Tabel 4.6. Indikator Jawaban Responden (x15)	45
Tabel 4.7. Pertanggungjawaban Anggaran.....	45
Tabel 4.8. Indikator Jawaban Responden (y11)	46
Tabel 4.9. Indikator Jawaban Responden (y12)	46
Tabel 4.10. Indikator Jawaban Responden (y13)	47
Tabel 4.11. Indikator Jawaban Responden (y14)	47
Tabel 4.12. Indikator Jawaban Responden (y15)	48
Tabel 4.13. Jumlah skor Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas Kinerja	48
Tabel 4.14. Hasil Analisis Regresi Linear Sederhana.....	49
Tabel 4.15. Koefisien Determinasi	50

DAFTAR GAMBAR

2.1. Kerangka Pemikiran	32
4.1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.....	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Jadwal Penelitian.....	55
Lampiran 2	<i>Abstrak</i>	57
Lampiran 3	Abstrak.....	58
Lampiran 4	Kuesioner	59
Lampiran 5	Jawaban Responden	62
Lampiran 6	Hasil Olah Data	64
Lampiran 7	Surat Keterangan Penelitian.....	71
Lampiran 8	Surat Balasan Penelitian	72
Lampiran 9	Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi	73
Lampiran 10	Hasil Turnitin	74
Lampiran 11	<i>Curriculum Vitae</i>	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah (LAN dan BPKP, 2000). Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif atau belum. Akuntabilitas dapat dilihat dari perspektif akuntansi, perspektif fungsional dan perspektif sistem akuntabilitas.

Akuntabilitas bisa dimengerti didalam hubungan antara atasan dengan karyawannya dimana atasan memiliki kepentingan guna melakukan penilaian kualitas kinerja pegawainnya. Menurut Mahsun (2013:99), bahwa ada 4 tahapan yang utama yang bisa diidentifikasi didalam sebuah proses akuntabilitas yaitu :

- a. Fungsi akuntansi ataupun pelaporan, ini merupakan kewajiban didalam sebuah pertanggungjawaban.
- b. Penginvestigasian atau pencarian informasi
- c. verifikasi atau proses penilaian.
- d. pengarahan atau pengendalian.

Penerapan anggaran diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang pelaksanaan anggaran yang berbasis yang kemudian diperbaharui menjadi Permendagri

No. 59 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sebuah anggaran yang berbasis kinerja digunakan sebagai suatu jawaban yang dipakai sebagai alat didalam melakukan pengukuran akuntabilitas dari kinerja pemerintah. penyusunan yang anggaran dengan basis ini memiliki tujuan agar bisa mengembangkan efisiensi pengalokasian sumber daya serta efektifitas pemanfaatannya yang sudah sesuai dengan perencanaan yang sudah diatur oleh pemerintah.

Anggaran memiliki fungsi, antara lain anggaran sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat politik, alat koordinasi, dan komunikasi, alat penilaian kerja, alat pemotivasi, dan sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Proses partisipasi dalam penyusunan anggaran pemerintah yaitu: publik pertemuan, kelompok fokus, simulasi, komite, dan survei, mengingat begitu pentingnya anggaran, maka perlu dilakukan penyusunan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah sebagai organisasi publik.

Anggaran harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, hasil dan perhatian masyarakat dari kegiatan atau proyek yang anggarannya disediakan. Anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama terhadap pengetahuan tentang proses penganggaran, karena berkaitan dengan keinginan dan kepentingan masyarakat, terutama untuk memenuhi kebutuhan penting masyarakat. Warga negara juga memiliki hak untuk menuntut tanggung jawab atas perencanaan atau pelaksanaan anggaran.

Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan *good governance* yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia, anggaran pada instansi pemerintah, selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian, juga berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas publik atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program- program yang dibiayai dengan uang publik.

Anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan hasil dari dibelanjakannya dana publik tersebut sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran mengenai kinerja instansi pemerintah. Penganggaran publik merupakan salah satu bidang tertentu bahwa pemerintah memberikan perhatian dalam rangka untuk menanggapi perubahan dunia. Untuk melakukan hal ini, pemerintah sedang berusaha untuk memberikan informasi yang handal dan lengkap untuk anggaran dan pembuat kebijakan sama sehingga pilihan anggaran substantif dapat dibuat.

Beberapa penelitian yang ada sebelumnya terkait anggaran berbasis kinerja diantaranya :

Lestari Indah Puji (2014), dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Survei Pada Dinas SKPD Pemerintah Kota Bandung). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana performance-based budgeting mempengaruhi akuntabilitas Pemerintah Kota Bandung. Populasi dalam survei ini adalah 13 kantor SKPD Pemerintah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan “one-to-one” antara satu variabel atau bagaimana satu variabel mempengaruhi variabel lainnya.. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan performance budgeting dan akuntabilitas dilaksanakan secara penuh oleh Kanwil di Kota Bandung, dan performance budgeting berpengaruh positif sebesar 2,125 dan signifikan 0,038. tentang tanggung jawab atas pekerjaan badan-badan negara.

Anggie Veronisa Claura dkk.2015 dengan judul penelitian Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten BengkalisBerdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan pertanggungjawabannya dilaksanakan sepenuhnya oleh Pokja Perangkat Daerah Kabupaten Benkalis dan Anggaran Kinerja..

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah focus pada akuntabilitas kinerja, sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini mempersempit cakupan penelitian hanya pada pertanggungjawaban anggaran.

Berdasarkan uraian latar belakang dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pohuwato dengan judul penelitian, "Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas, maka masalah penelitiannya yang diangkat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato”.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan pada Badan Keuangan Daerah adalah untuk mendapatkan data-data yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, terutama data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian dengan menyebarluaskan kuisioner kepada responden.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah : ” Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato”.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk:

1. Praktisi; yaitu sebagai bahan pertimbangan pemerintah daerah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
2. Akademisi; sebagai tambahan literatur atau bahan bacaan baik dosen maupun mahasiswa yang ingin mengetahui tentang penerapan anggaran berbasis kinerja ditinjau dari pelaporan/pertanggungjawaban dan juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya.
3. Peneliti; sebagai pembuktian teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Konsep Anggaran

Sebuah alat bantu yang digunakan oleh pihak manajemen didalam menjalankan tugasnya yang terutama didalam melakukan sebuah perencanaan dan pengendalian disebut anggaran. Jumlah sebuah anggaran itu tergantung dari suatu perencanaan serta pengendalian anggarannya, jika terjadi suatu penyimpangan didalam melaksanakan anggaran yang disebabkan oleh tingginya penetapan anggaran, maka dibutuhkan sebuah cara guna melakukan pengendalian yang bisa dilakukan dengan cara melakukan peninjauan kembali hasil penetapan anggaran yang sebelumnya sehingga didalam proses pelaksanaan bisa diwujudkan dengan baik dan bisa digunakan sebagai suatu tolak ukur suatu perusahaan didalam melakukan perencanaan serta pengendalian dari suatu anggaran, sehingga diperiode selanjutnya bisa dijadikan sebagai suatu perbaikan yang positif. Anggaran juga bisa dikatakan sebagai suatu alat bantu untuk perusahaan didalam memperoleh tujuannya yaitu mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan produksi baik itu berupa barang maupun jasa yang kemudian dijual kembali kepada para konsumen sehingga perusahaan bisa memperoleh pendapatan yang lebih optimal.

Ada beberapa pendapat para ahli mengenai anggaran yaitu menurut M. Nafarin (2007:9), berpendapat bahwa anggaran merupakan sebuah perencanaan mengenai keuangan periodic yang disusun sesuai dengan program yang sudah disahkan. Anggaran yaitu sebuah perencanaan kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang bisa digunakan dalam melakukan pengukuran satuan moneter standar serta satuan ukuran yang lain dengan jangka waktu 1 tahun.

Sedangkan menurut Darsono dan Ari Purwanti (2008:1), berpendapat bahwa ada berbagai jenis arti mengenai anggaran yaitu sebagai berikut :

- 1) Anggaran atau biasa disebut *budget* yaitu sebuah perencanaan yang meliputi proses perencanaan penjualan, perencanaan produksi, perencanaan pemakaian bahan baku, perencanaan tenaga kerja langsung, perencanaan biaya tak terduga, perencanaan biaya pemasaran, perencanaan biaya umum serta administrasi dan seterusnya, Modal ini pada dasarnya dikatakan sebagai suatu anggaran yang memiliki skala yang lengkap ataupun *master budget*.
- 2) Anggaran merupakan suatu sistem yang terdiri 3 lapisan yaitu
 - dari sistem inti yaitu sasaran keuntungan
 - subsistem penunjang yaitu berbagai jenis kegiatan didalam membantu kelancaran kerja dari sistem inti seperti struktur organisasi, analisis data, administrasi, nilai-nilai standard serta lainnya.
 - subsitem lingkungan yaitu lingkungan dari luar organisasi seperti ekonomi, social, politik, budaya serta lain sebagainya yang bisa berdampak dalam melaksanakan pekerjaan di suatu sistem organisasi.
- 3) Anggaran terdiri dari anggaran fisik dan anggaran keuangan. Anggaran yang normal disebut dengan perencanaan kinerja yang dicantumkan secara tertulis dengan bentuk nilai-nilai keuangan, normal yaitu suatu hal yang lazim.
- 4) Anggaran dianggap sebagai suatu hal yang otonom, hal ini dikarenakan ia memiliki target dan cara kerja tersendiri yang merupakan 1 kebulatan yang memiliki perbedaan dengan target cara kerja dari sistem ini yang ada didalam perusahaan : anggaran yang juga disebut sebagai susistem.

- 5) Anggaran bisa dikatakan sebagai suatu sistem yang mempunyai nilai khusus tersendiri ataupun sebagai suatu sub-sistem yang membutuhkan hubungan dengan sub-sistem lainnya yang berada didalam sebuah organisasi ataupun perusahaan.
- 6) Anggaran merupakan sebuah rencana mengenai suatu aktivitas diperusahaan yang mencangkup berbagai aktivitas-aktivitas operasional yang memiliki keterkaitan serta saling memberikan pengaruh antara satu dengan lainnya sebagai suatu acuan didalam mencapai suatu tujuan serta target didalam sebuah organisasi yang pada umumnya disusun secara tertulis.
- 7) Anggaran merupakan sebuah perencanaan laba strategis jangka panjang, didalam perencanaan taktis laba jangka pendek; sebuah sistem akuntansi yang berdasarkan tanggung jawab; sebuah pemakaian prinsip pengecualian yang memiliki hubungan, sebagai suatu alat guna mencapai tujuan serta target di sebuah organisasi.

Dari penjelasan diatas mengenai anggaran, maka bisa disimpulkan bahwa anggaran adalah sebuah perencanaan manajemen tentang perolehan serta pemanfaatan sumber daya diperusahaan yang dinyatakan secara formal serta rinci didalam bentuk kuantitas dan didalam sebuah periode tertentu.

2.1.1. Fungsi Anggaran

Munandar (2000 :10), berpendapat bahwa terdapat beberapa fungsi dari anggaran antara lain:

- 1) Sebagai alat dalam mengkoordinasi kerja

Fungsi anggaran yaitu sebagai suatu alat didalam mengkoordinasi kerja supaya seluruh bagian yang terdapat didalam suatu perusahaan harus bisa saling menunjang, saling kerja sama dengan pihak manajemen guna memperoleh target yang sudah ditentukan sehingga dengan begitu jalannya perusahaan bisa lebih lancar dan terjamin.

2) Sebagai sebuah acuan dalam bekerja

Pada fungsi ini anggaran bisa mengaragkan serta bisa memberikan target-target yang wajib untuk dicapai oleh aktifitas-aktifitas diperusahaan diwaktu yang akan datang.

3) Sebagai alat dalam pengawasan kerja

Pada fungsi ini anggaran digunakan sebagai alat tolak ukur, alat didalam membandingkan evaluasi penerapan kegiatan diperusahaan dengan membandingkan apa yang sudah dicantumkan didalam suatu anggaran dengan apa yang sudah diperoleh untuk pelaksanaan kerja perusahaan. Hal ini memiliki manfaat didalam melakukan penyusunan rencana kedepannya dengan lebih matang serta lebih akurat.

2.1.2. Karakteristik Anggaran

Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan (2000:1), berpendapat bahwa ada 7 karakteristik anggaran, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada umumnya meliputi waktu dengan jangka waktu 1 tahun.
- 2) Anggaran dapat memperkirakan laba yang memiliki potensi yang berasal dari unit usaha.
- 3) Dinyatakan didalam unit moneter, walauun total moneter bisa saja didukung dengan total non moneter.

- 4) Suatu perjanjian manajemen yang menyatakan bahwa pihak manajer bersedia untuk mempertanggungjawabkan didalam mencapai tujuan dari anggaran.
- 5) Usulan anggaran diperiksa serta disetujui oleh pihak yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada pembuat anggaran.
- 6) Perubahan suatu anggaran hanya bisa dilakukan disaat-saat tertentu saja.
- 7) Secara bertahap kinerja keuangan actual dibanding dengan anggaran serta perbedaan yang dianalisis serta dijelaskan.

Melalui penjelasan diatas maka bisa ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya anggaran umumnya mencangkup jangka waktu satu tahun yang digambarkan kedalam satuan keuangan serta satuan lain diluar keuangan.Selain itu, anggaran komitmen manajemen yang bermakna bahwa semua manajer sudah sepakat didalam menerima tanggung jawab agar bisa mencapai target yang sudah ditetapkan didalam suatu anggaran.

2.1.3. Tujuan dan Manfaat Anggaran

Menurut M. Nafarin (2007:19), berpendapat bahwa terdapat enam tujuan dari pembuatan suatu anggaran, yaitu :

1. Menampung seta menganalisis dan memutuskan setiap usulan yang memiliki keterkaitan dengan keuangan.
2. Sebagai alat penyempurnaan rencana yang sudah disusun hal ini dikarenakan dengan adanya suatu anggaran bisa menjadi lebih jelas serta nyata terlihat.
3. Dapai dipakai sebagai suatu landasan yuridis formal didalam melakukan pemilihan sumber serta penanaman modal.
4. membuat pembatasan jumlah dana yang dicari serta digunakan.

5. melakukan perincian terhadap jenis-jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penanaman modalnya, sehingga bisa memudahkan kegiatan pengawasan.
6. Merasionalkan sumber serta penanaman dana supaya bisa mencapai hasil semaksimal mungkin.

M. Nafarin (2007:19), berpendapat bahwa terdapat 6 manfaat dari suatu anggaran, yaitu :

1. Bisa memotivasi pegawai.
2. Bisa dipakai sebagai suatu alat didalam menilai kekurangan dan kelebihan dari pegawai.
3. Menghindar dari pemborosan serta pembayaran yang tidak terlalu diperlukan.
4. Menciptakan tanggung jawab tertentu kepada para karyawan.
5. Sumber daya yang bisa dimanfaatkan dengan lebih efisien (seperti tenaga kerja, peralatan serta dana).
6. Sebagai alat pendidikan untuk manajer.

Sehingga bisa dinilai apakah perusahaan sudah sukses didalam melaksanakan pekerjaan ataupun belum sukses dari suatu bandingan serta analisis bisa diketahui penyebab penyimpangan antara anggaran serta realisasinya, sehingga bisa diketahui juga kelemahannya serta kelebihan dari suatu perusahaan. Hal tersebut bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat penting guna melakukan penyusunan rencana penggunaan anggaran yang selanjutnya dengan lebih akurat.

2.1.4. Kelemahan dan Kelebihan Anggaran

Terdapat beberapa kelehana dari suatu anggaran, yaitu :

- a) Keadaan yang seudang terjadi terkadang tidak 100% sesuai dengan yang sudah diramalkan terlebih dahulu, sehingga anggaran harus mempunyai sifat yang luwes.

- b) Anggaran hanya berupa sebuah alat yang digunakan dalam membantu manajer didalam melakukan semua tugasnya, bukan untuk menggantinya.
- c) anggaran adalah suatu rencana dan rencana itu baru berhasil jika dilakukan dengan sungguh-sungguh.
- d) Anggaran disusun berdasarkan estimasi sehingga terlaksananya suatu kegiatan dengan baik tergantung pada sebuah ketepatan estimasi tersebut.

Tendi Haruman & Sri rahayu (2007:8), berpendapat bahwa terdapat 5 kelebihan dari suatu anggaran yang akan didapatkan suatu perusahaan jika dilaksanakan dengan baik, yaitu :

- a) Suatu hasil proyeksi yang sudah ada setelah rencana tersebut dilaksanakan bisa menghasilkan peluang bagi pihak manajemen dalam memilih rencana apa yang bisa menghasilkan keuntungan yang maksimal jika dilakukan.
- b) Didalam melakukan penyusunan suatu anggaran, harus terlebih dulu untuk dilakukan analisis dengan lebih teliti terhadap seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan. analisis ini memiliki manfaat untuk pihak manajemen sekalipun ada pilihan untuk tidak meneruskan keputusan tersebut.
- c) Anggaran adalah penelitian untuk kerja, sehingga bisa digunakan sebagai tolak ukur dalam melakukan penilaian baik buruknya soutu hasil yang didapatkan.
- d) Anggaran membutuhkan suatu dukungan organisasi yang baik sehingga manajer bisa tahu mengenai kekuasaannya, kewenagannya serta kewajibannya. Anggaran juga memiliki fungsi sebagai alat didalam mengendalikan pola kerja karyawan didalam melaksanakan sebuah kegiatan.

- e) Mengingat masing-masing menejer ataupun penyelia diikutsertakan didalam melakukan penyusunan anggaran, maka besar kemungkinan terciptanya perasaan ikut berperan serta.

2.1.5. Jenis-Jenis Anggaran

Didalam sebuah perusahaan yang sudah berjalan dengan baik serta mapan, pada umumnya diterapkan sebuah anggaran didalam bentuk paket, yang berarti anggaran tersebut disusun dengan lengkap yang memiliki sangkut paut dengan rencana untuk seluruhnya, sehingga bisa meliputi anggaran untuk beberapa bagian perusahaan.

M. Nafarin (2007:31), berpendapat bahwa terdapat beberapa jenis anggaran yang bisa dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan dasar penyusunannya terdiri dari :
 - Anggaran variabel merupakan suatu anggaran yang disusun berdasarkan interval, kapasitas tertentu serta pada intinya merupakan sebuah seri anggaran yang biasa disesuaikan dengan tingkat-tingkat kegiatan yang berbeda-beda.
 - Anggaran tetap merupakan sebuah anggaran yang dibuat berdasarkan sebuah tingkatan kapasitas tertentu.
- 2) Berdasarkan cara penyusunannya terdiri dari :
 - Anggaran kontinyu yaitu suatu anggaran yang dibuat untuk melakukan perbaikan anggaran yang sudah pernah dibuat seperti setiap bulan dilaksanakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat setahun mengalami perubahan.
 - Anggaran periodik yaitu suatu anggaran yang disusun untuk sebuah periode tertentu, yang pada dasarnya periode satu tahun disusun disetiap akhir periode anggaran.
- 3) Berdasarkan jangka waktunya, terdiri dari :

- Anggaran strategis (jangka panjang), yaitu anggaran yang dibuat dengan waktu yang lebih dari 1 tahun. Anggaran jangka panjang ini dibuat untuk keperluan dalam proses penginvestasian yang disebut anggaran modal. Anggaran ini diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek juga.
 - Anggaran taktis merupakan suatu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu maksimal 1 tahun saja. Anggaran jangka pendek hanya digunakan untuk keperluan modal kerja saja.
- 4) Berdasarkan bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini jika digabung maka bisa disebut dengan anggaran induk. Anggaran induk merupakan sebuah jaringan kerja yang berisi beberapa jenis anggaran yang dipisah, namun saling memiliki hubungan serta saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan diperusahaan untuk jangka waktu pendek, pada umumnya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan kemudian dipecah lagi menjadi anggaran triwulan yang kemudian anggaran triwulan tersebut dipecah lagi menjadi anggaran bulanan.

2.2. Konsep Kinerja

Fahmi (2013:127), berpendapat bahwa kinerja merupakan hasil yang didapatkan oleh sebuah organisasi baik organisasi yang bersifat profit maupun non profit oriented yang didapatkan dalam jangka waktu 1 periode tertentu saja. Kinerja merupakan gambaran tentang tingkatan pencapaian pelaksanaan sebuah program guna mewujudkan target, tujuan, fungsi, visi dan misi disebuah organisasi yang sudah dituangkan didalam perumusan skema yang strategis disebuah organisasi, (Fahmi 2013 :128).

Pasolong (2010 : 175), berpendapat bahwa konsep kinerja pada dasarnya

2.3. Konsep Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran Berbasis Kinerja pada pemerintah daerah pertama sekali digulirkan dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 yang berisi panduan untuk membuat anggaran kinerja, pelaksanaan anggaran sampai dengan pelaporan pelaksanaan anggaran. Regulasi ini kemudian disempurnakan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

Anggaran berbasis kinerja merupakan metode anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dari hasil tersebut, Nurlan (2008).

Anggaran Berbasis Kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat terhadap Visi, Misi dan Rencana Strategis organisasi. Anggaran Berbasis Kinerja mengalokasikan sumberdaya pada program bukan pada unit organisasi semata dan memakai output measurement sebagai indikator kinerja organisasi (Bastian, 2006).

Anggaran Berbasis Kinerja Atau, Pengeluaran (ABK) adalah metode penganggaran yang memungkinkan Anda untuk mengorelasikan biaya setiap aktivitas yang dilaporkan dengan laba yang dihasilkan. Manfaat tersebut dinyatakan dalam seperangkat tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam sasaran kinerja setiap unit kerja (Anggraini, 2010).

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya adalah sebuah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan erat dengan visi, misi, dan rencana strategis organisasi, Bastian (2006). Anggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan

dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut, Kurniawan (2009).

Secara teoritis, prinsip penganggaran berbasis kinerja adalah penganggaran, yang menghubungkan anggaran pemerintah (pengeluaran pemerintah) dengan hasil yang diinginkan (manfaat dan keluaran) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat membayar manfaatnya. Penganggaran berbasis efisiensi bertujuan untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara dengan hasil yang jelas dan hasil yang sejalan dengan prioritas nasional, sehingga semua anggaran yang diterbitkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas.

Penerapan anggaran berbasis kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan dampak peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang memprioritaskan upaya untuk mendapatkan produk atau pekerjaan dari biaya yang direncanakan atau pendapatan yang ditetapkan. (Penjelasan GD no. 105 Tahun 2000, pasal 8). Anggaran yang dibuat menurut pendekatan kinerja dapat diartikan sebagai berikut:

1. Sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil (pekerjaan) dari rencana alokasi pengeluaran (input) tertentu.
2. Hasil menunjukkan barang (barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan.
3. Input adalah jumlah sumber daya keuangan, sumber daya manusia bahan, waktu teknologi yang digunakan untuk melaksanakan proyek atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan.
4. Efisiensi ditunjukkan dengan perbandingan masukan (output) terhadap keluaran (output).

Penganggaran berbasis kinerja didasarkan pada hasil yang diperoleh dari setiap dana yang dihimpun sesuai harapan masyarakat. Berbeda dengan sistem anggaran lama yang hanya menekankan pada kemampuan pemerintah menyerap anggaran, tetapi mengabaikan hasil yang diinginkan (Sony Yuwono, 2007).

Tahapan penyusunan anggaran berbasis kinerja meliputi empat langkah, (Deddi Nordiawan, 2006)

3. Penetapan Aktivitas.

Tahapan selanjutnya adalah menetapkan aktifitas dipilih berdasarkan strategi organisasi dan tujuan operasional yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi dan Pengambilan Keputusan.

Langkah selanjutnya setelah pengajuan anggaran disiapkan adalah proses evaluasi dan pengambilan keputusan.

Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa penganggaran kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang didasarkan pada hasil yang dicapai dari masing-masing dana tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di sisi lain, cara mencapai tujuan didefinisikan dalam program dan kemudian didanai pada setiap tingkat untuk mencapai tujuan.

Menurut Mardiasmo (2009) bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dimulai dari proses perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran dan evaluasi harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Anggaran

Perencanaan Ini adalah aspek penting dari kehidupan sehari-hari dan masalah organisasi. Merencanakan berarti memikirkan dengan matang. Kami berharap rencana ke depan kami, sumber daya kami akan digunakan untuk memandu langkah kami, bahwa sumber daya kami akan dikelola dengan baik, tidak akan ada pemborosan. waktu uang. Tidak ada sumber daya, tidak ada biaya besar. Perencanaan anggaran daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses.

Rencana anggaran daerah. Menurut UU No. 17 Tahun 2003 dan Pasal 32 dan 33 UU 2004:

- 1) Pemerintah Negara Bagian menyampaikan ciri-ciri utama APBD untuk tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyusunan APBD pada pertengahan Juni tahun ini. Kebijakan APBD didorong oleh RKPD. Proses penyusunan RKPD antara lain dengan melakukan musyawarah perencanaan (musrenbang) yang mengikutsertakan dan/atau mendukung aspirasi masyarakat terdampak, termasuk Ikatan Ahli, selain diupayakan oleh unsur pemerintah. Ini akan dieksekusi. , Perguruan Tinggi, LSM, tokoh adat, tokoh agama, pengusaha.
- 2) Republik Demokratik Rakyat Korea kemudian akan membahas keseluruhan kebijakan anggaran yang digariskan oleh pemerintah daerah selama negosiasi RAPBD pertama untuk tahun anggaran berikutnya.
- 3) Selain jawaban DPRD, APBD TNI yang direkomendasikan DPRD menjadi prioritas. Batas atas ditetapkan untuk anggota SKPD lainnya.
- 4) Sebagai pengguna anggaran, penanggung jawab SKPD akan menyusun RKA-SKPD tahun mendatang dengan mengacu pada prioritas dan batasan anggaran sementara yang ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

- 5) RKA-SKPD selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembahasan awal RAPBD.
- 6) Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada otoritas pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang APBD tahun depan.
- 7) Pada minggu pertama Oktober tahun lalu, pemerintah daerah menyerahkan ke DRC RUU anggaran dengan informasi dan dokumen tambahan.
- 8) Keputusan DPRD untuk Proyek Tirai dalam APBD diambil paling lambat satu bulan sebelum pelaksanaan tahun anggaran yang berlaku di daerah.

2. Pelaksanaan anggaran

Anggaran mengelola seluruh pendapatan daerah dan belanja daerah sebagai bagian dari pelaksanaan. Pelaksanaan APBD meliputi penerimaan, pencairan, dan pelaksanaan perkiraan pendanaan.

Pembahasan badan pembuat kebijakan tidak lepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah ciri-ciri hubungan, norma dan pola yang sering muncul dalam eksekutif, dan yang mungkin memiliki hubungan nyata dengan orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Politik yang kompleks membutuhkan kerja sama banyak orang. Unsur-unsur yang dapat mempengaruhi organisasi dalam pelaksanaan kebijakannya antara lain adalah lembaga yang melakukan pengawasan secara hierarkis atas proses pengambilan keputusan – operasional sub-bagian.

Pelaksanaan anggaran membutuhkan lebih banyak orang daripada mempersiapkan dan mempertimbangkan umpan balik dari lapangan. Oleh karena itu, implementasi anggaran terlihat seperti ini:

- a. Memastikan pelaksanaan anggaran sesuai dengan kekuatan keuangan dan kebijakan yang telah diberikan kepadanya.
- b. Penyesuaian pelaksanaan anggaran dengan perubahan besar dalam ekonomi makro.
- c. Mengidentifikasi masalah yang dihadapi selama implementasi.
- d. Menangani pembelian dan menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif.

Sistem pelaksanaan anggaran harus memastikan bahwa kekuatan anggaran diperhitungkan dan dapat melakukan pemantauan dan pelaporan, yang dapat segera mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan anggaran dan memberikan fleksibilitas kepada pengelola.

3. Pelaporan/Pertanggungjawaban Anggaran

Pelaporan/pertanggungjawaban anggaran yang dituangkan dalam laporan akuntabilitas kinerja harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan. Laporan akuntabilitas kinerja menguraikan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian visi dan misi serta berguna sebagai bahan evaluasi atau umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisan, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilaksanakan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer yang dilaksanakan oleh PPK-SKPD. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran SKPD dilaksanakan secara periodik yang mencakup :

- a. Laporan realisasi anggaran SKPD
- b. Neraca SKPD

c. Catatan atas laporan keuangan SKPD

Pada setiap akhir tahun anggaran dan periode pemerintahan Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakil dari masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan sumber daya daerah. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD ditinjau dari laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada ayat 2 disebutkan bahwa laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi Laporan Keuangan APBD, Neraca, Laporan Aliran Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Kepala SKPD menyusun dan melaporkan arus kas secara periodik kepada kepala daerah, laporan tersebut disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan. Pelaporan ini mencakup besarnya realisasi anggaran dan pencapaian hasil kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.

4. Evaluasi Kinerja

Penilaian kinerja dimunculkan oleh kemampuan untuk menerapkan manajemen kinerja dan kadang-kadang disebut manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah cara bagi organisasi sektor publik untuk mengukur kemajuan program atau kegiatan yang mereka laksanakan untuk mencapai hasil yang diharapkan pelanggan (dalam hal ini disebut komunitas). Manajemen kinerja juga didefinisikan sebagai pendekatan sistematis untuk peningkatan kinerja melalui proses berkelanjutan menetapkan tujuan kinerja strategis, mengukur kinerja, mengumpulkan data kinerja, menganalisis, melaporkan dan menggunakan data itu, dan mempromosikan peningkatan

kinerja. pertunjukan.Untuk menjaga agar pelaksanaan program pembangunan yang dilakukan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Maka dalam manajemen kinerja diperlukan proses pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi. Monitoring atau pemantauan berarti pengumpulan, analisis, pelaporan dan penggunaan informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

untuk hasil pembangunan. Waktu pelaksanaan monitoring dilakukan mulai dari awal hingga akhir kegiatan, pihak yang melakukan monitoring umumnya adalah pihak internal yang bertanggungjawab atas pelaksanaan program pembangunan.Tujuan dari dilaksanakannya monitoring adalah untuk mencegah penyimpangan dan objek pengukurannya antara rencana dengan implementasi.

Pemantauan merupakan bagian dari proses implementasi, tetapi tidak ada hubungannya dengan hasil pengembangan. Pengawasan dilakukan dari awal sampai akhir kegiatan, tetapi pengawas biasanya merupakan badan internal yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program pengembangrencia dengan realisasi). Berdasarkan bentuknya evaluasi dibedakan atas tiga macam, yaitu :

a. Tinjauan Administratif

Tinjauan administratif adalah evaluasi yang terutama berfokus pada masalah keuangan dan proses kebijakan publik.

b. Tinjauan Penghakiman

Judicial review adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat perbedaan fungsi hukum dalam kebijakan publik. Peninjauan kembali ini berkaitan dengan keabsahan kebijakan yang diikuti.Evaluasi politik.

c. Tinjauan politik

adalah evaluasi bahwa pemikiran politik terbuka untuk semua. Evaluasi masa depan publik adalah masalah kebijakan publik. Evaluasi politik mengevaluasi Jan Paring Quat juga rating, Karina Miske Idaritiiv y, yudisial proklamasi namun ini tidak dipenuhi rating, pelaksanaan pembangunan seringdianggap gagal program..

Di pemerintah daerah, penilaian telah berubah. Angka dasar pada pemerintah daerah Peringkat 22/1999 menunjukkan bahwa DPRD sudah di tangan. Evaluasi internal seperti inspektorat daerah dan evaluasi eksternal adalah: BPK, BPKP) Swasta dan LSM berpartisipasi dalam evaluasi pemerintah daerah: berdasarkan pemberitahuan Presiden LAKIP No. 7/1999. Pengertian ketentuan negara oleh Kementerian Dalam Negeri disampaikan kepada LPPD (Laporan Kewajiban Pemerintah Daerah).

2.4 Akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah

Schiavo-Campo and Tomasi dalam Kurniawan (2009) mengemukakan bahwa pada dasarnya akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan, olehnya itu akuntabilitas dipandang penting dalam sebuah perusahaan, organisasi nonprofit, baik pemerintahan maupun nonpemerintahan, Akuntabilitas juga berarti menunjukkan tanggung jawab individu atau organisasi dalam mengelola sumber daya yang disediakan dan memantau dalam mencapai tujuan, dalam konteks laporan kinerja reguler.

Dalam hal ini, sumber daya adalah struktur pendukung yang tersedia bagi individu atau unit organisasi untuk memfasilitasi kinerja tugas yang diberikan. Jenis sumber daya ini umumnya dilihat dari segi sumber daya manusia, sumber daya keuangan, infrastruktur, dan metode kerja. Gagasan tentang sumber daya dapat dilihat dalam konteks negara aparatur pemerintah, sumber daya alam, peralatan, uang, kekuatan hukum dan politik.

Berdasarkan definisi kewajiban, maka akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / badan hukum/ pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan. (LAN RI dan BPKP, 2003).

Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subjek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya. Pemberian informasi dan pengungkapan kinerja keuangan ini adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat, yaitu hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk diperhatikan aspirasi dan pendapatnya, hak diberi penjelasan, dan hak menuntut pertanggungjawaban. Karenanya, birokrasi publik dapat dikatakan akuntabel jika dapat mewujudkan apa yang menjadi harapan publik (Husen, 2004).

Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah seringkali bermasalah, sehingga koordinasi antar pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam mengembangkan penilaian manajemen kinerja diperlukan untuk mencapai tujuan akuntabilitas pembangunan secara memadai. ..

Pencapaian akuntabilitas jelas didukung oleh mekanisme organisasi yang jelas dan kolaborasi antara pihak-pihak yang terlibat, yang memungkinkan kementerian, departemen, lembaga, dan pemerintah daerah mengembangkan sistem kinerja yang akuntabel. Hal lain yang

perlu diperhatikan dalam praktik adalah akuntabilitas kinerja yang kredibel, berpengetahuan dan informatif sehingga proses manajemen kinerja dapat direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik dan dilaporkan dengan berkualitas.

Pemerintah daerah melaporkan pertanggungjawabannya dalam Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LAKIP) dan Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD). LAKIP dipimpin oleh Rensta dan LAKIP meliputi kegiatan pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana bisnis selama satu atau lima tahun. Kebijakan LAKIP diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penghapusan KKN. Hasil keuangan pemerintah laporan kegiatan.

Isu yang dilaporkan oleh LAKIP pemerintah daerah akan diterbitkan dalam waktu satu sampai lima tahun sebagai bagian dari program prioritas dan prioritas pembangunan daerah. Jelas, LAKIP ini jelas menunjukkan kinerja keuangan dan kinerja kegiatan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja kegiatan dilakukan dengan menggunakan indikator: input, proses, output, hasil, manfaat dan efek.

Menurut Bastian (2006), indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja untuk setiap kegiatan meliputi:

1) Indikator masukan (input)

Input adalah semua yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa. Indikator tersebut meliputi informasi tentang dana, sumber daya manusia, sumber daya, informasi, dll.

2) Indikator keluaran (keluaran)

Keluaran (output) adalah produk atau keluaran langsung dari kegiatan/kegiatan yang dilakukan. Jika tujuan kinerja dikaitkan dengan tujuan kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur,

indikator keluaran adalah dasar untuk mengevaluasi kinerja kegiatan. Oleh karena itu, indikator keluaran harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi terkait. Indikator keluaran digunakan untuk memantau jumlah produk yang dapat diproduksi atau dikirimkan.

3) hasil

Hasil mencerminkan kinerja aktual dan menggambarkan bagaimana hasil tersebut dapat digunakan. Indikator hasil adalah ukuran efektivitas suatu program dalam mencapai tujuannya. Pencapaian tujuan dapat ditentukan dalam satu tahun anggaran, beberapa tahun anggaran, atau satu periode pemerintahan. Indikator hasil digunakan untuk mengetahui seberapa baik tujuan masing-masing fungsi pemerintahan, yang dicapai melalui hasil kegiatan (produk atau jasa), memenuhi kebutuhan masyarakat yang dituju.

4) kehormatan

Hal ini terkait dengan tujuan akhir dari keuntungan.

5) Pengaruh

Pengaruhnya positif dan negatif pada setiap level indikator, berdasarkan asumsi yang dibuat.

Di sisi lain, kinerja keuangan diukur dengan indikator tingkat efisiensi. Kecuali LAKIP, terdapat salah satu Laporan Pertanggungjawaban Daerah LPPD. LPPD menerima tanggung jawab atas kegiatan yang menggunakan dana dari APBD atau APBN. LPPD dibentuk sesuai dengan UU Pemerintah Daerah No. 32/2004, atas dasar pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah. Keputusan pemerintah yang termasuk dalam RPJM adalah aspek-aspek yang dilaporkan kepada pemerintah daerah dalam LPPD.

LPPD untuk daerah atau kabupaten baru memuat laporan tentang persiapan pemerintahan, termasuk mekanisme pemilihan, persiapan pembentukan organisasi daerah, dan persyaratan lain yang diperlukan oleh kabupaten baru ke arah pemerintah. Sedangkan untuk

daerah yang sudah mapan atau sudah memiliki status pemerintahan menyelenggarakan sepenuhnya, LPPD memasukkan aspek-aspek seperti yang tercantum dalam LAKIP.

Selain pemerintah, Republik Rakyat Demokratik Korea, dan khususnya Republik Rakyat Demokratik Korea, memiliki laporan kinerja LKPJ, yang mencantumkan tanggung jawab terkait pelaksanaan anggaran.

2.5. Kerangka Pemikiran

Tanggung jawab keuangan nasional adalah tanggung jawab pemerintah untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efisien dan transparan, mempertimbangkan keadilan dan legalitas, serta mengelola keuangan negara secara tertib. Tugas inilah yang menjadi dasar untuk menggerakkan roda pemerintahan. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas tugas yang telah diselesaikan muncul dalam bentuk laporan pelaporan anggaran. Untuk memenuhi tanggung jawab keuangan tersebut, UU No.. 2003 17, UU No. tentang Keuangan Negara. 2004 1, Undang-undang nomor Perbendaharaan. 2004 15, UU No. Tentang Pengelolaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,Peraturan.

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Peraturan Standar Akuntansi Publik (PSAP) dan peraturan lainnya. Semua undang-undang ini dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah, selain menyusun laporan pelaksanaan anggaran, juga harus menyusun anggaran, laporan keuangan, dan nota anggaran sesuai kesepakatan dengan provinsi.Dan mulai beberapa tahun terakhir, pemerintah pusat telah menyusun laporan keuangan dalam bentuk seperti yang diamanatkan oleh Undang Undang.

Pada penelitian ini penulis melihat dari dua obyek yaitu, pertanggungjawaban anggaran dan akuntabilitas kinerja, adapun gambar kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



2.6. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis pada penulisan karya ilmiah ini adalah :" Pertanggungjawaban anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

BAB III

OBYEK DAN METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah Pertanggungjawaban anggaran sebagai variabel bebas (X) dan Akuntabilitas kinerja sebagai variabel terikat (Y).

3.2. Metodologi Penelitian

3.2.1. Desain penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian survei, Kerlinger dalam Riduwan (2013:49), penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil,tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian-kejadian relatif, distribusi, hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Penelitian survei biasanya dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat bila digunakan sampel yang representatif.

3.2.2. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

A. Definisi Variabel

Definisi Operasional Definisikan penelitian atau definisikan kata kunci dan jelaskan bagaimana suatu operasi atau aktivitas harus dilakukan untuk mendapatkan data dan indikator yang diinginkan.

Untuk memudahkan dan menghindari multitafsir atas makna penelitian ini, peneliti menjelaskan definisi operasional variabel sebagai berikut:

Anggaran berbasis kinerja adalah penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja ada beberapa variabel yang perlu diperhatikan sebagai tahapan yang harus dilakukan salah satunya yaitu pelaporan/pertanggungjawaban anggaran sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Anggaran (X)

Pertanggungjawaban Anggaran yang dimaksud disini yaitu besarnya pengalokasian anggaran unit kerja serta besarnya suatu anggaran yang sudah digunakan serta hasil yang sudah dicapai dari penggunaan anggaran dan aktivitas ataupun program yang sudah dilakukan.

2. Akuntabilitas kinerja (Y)

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran akuntabilitas kinerja menggunakan indikator, *Input, Proses, Output, Outcome, Benefit dan Impact.*

B. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel ini dibutuhkan didalam melakukan sebuah penjabaran dari variabel-variabel penelitian kedalam indicator tertentu yang mempermudah didalam melakukan suatu pengukuran yang kemudian bisa dipakai sebagai suatu acuan didalam mengumpulkan data guna menjawab *problem-problem* yang dikaji didalam penelitian ini serta agar bisa menghindar dari sebuah kekeliruan didalam melakukan penafsiran masalah, dengan begitu maka didalam penelitian ini penulis membatasi variabel-variabel yang akan diukur, sehingga variabel tersebut yang akan diteliti diberikan suatu batasan-batasan operasional.

Penelitian ini memakai dua variabel penelitian berupa Pertanggungjawaban Anggaran (X) Dan Akuntabilitas Kinerja (Y).

Tabel 3.1.Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Skala
----------	-----------	-------

Pertanggungjawaban Anggaran (X) Mardiasmo (2009)	1. Besarnya alokasi anggaran unit kerja, 2. Besarnya anggaran yang telah dikeluarkan 3. Pencapaian hasil kerja atau kegiatan atau program yang telah dilaksanakan.	Skala Interval
Akuntabilitas Kinerja (Y) Bastian (2006)	1) Indikator Masukan (<i>Input</i>) 2) Indikator Keluaran (<i>Output</i>) 3) Hasil (<i>Outcome</i>) 4) Manfaat (<i>Benefit</i>) 5) Dampak (<i>Impact</i>)	Skala Interval

Berdasarkan uraian definisi operasional variabel tersebut di atas, maka selanjutnya dilakukan perubahan data dari data kualitatif menjadi kuantitatif agar dapat dengan mudah diukur, dianalisa dan ditentukan dengan memberikan nilai untuk indikator-indikator dari variabel dengan kategori yang didasarkan dengan Skala Likert. Menurut Riduwan (2013 : 86), bahwa Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan presepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial. Dengan menggunakan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi dimensi, dimensi dijabarkan menjadi sub variabel kemudian sub variabel dijabarkan lagi menjadi indikator-indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item instrumen yang berupa pertanyyan atau pernyataan yang perlu dijawab responen. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sebagai berikut :

Tabel 3.1. Bobot Alternatif Skala Likert

Pilihan	Bobot
Sangat setuju	5
Setuju	4
Netral/Ragu-ragu	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

3.2.3. Teknik pengumpulan data

Gunakan metode berikut untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian ini:a..

a. Penelitian Perpustakaan (Library Research)

Tujuan studi sastra adalah untuk mengumpulkan karya-karya sastra seperti buku, jurnal, dan buletin yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

b.. penelitian lapangan (survei lapangan)

Penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan data dasar. Informasi utama diperoleh dari situs pencarian dengan cara berikut:

1. Mengumpulkan informasi melalui wawancara langsung dengan pihak yang mengetahui masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kajian masalah secara kronologis.

Kuesioner: Penyebaran kuesioner yang berisi pertanyaan atau data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dasar untuk dianalisis.

3.2.4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data kualitatif, yaitu data-data yang berupa pernyataan-pernyataan atau uraian-uraian dari sumber data yang ada.
2. Data kuantitatif, yaitu data berupa angka-angka atau nilai-nilai, tabel, dan grafik yang sifatnya dapat dihitung atau dijumlahkan.

b. Sumber data

1. Data primer, yaitu data yang bersumber dari lokasi penelitian berupa data utama yang akan dianalisis, dalam hal ini data yang diperoleh melalui pembagian angket atau kuisioner kepada responden.
2. Data sekunder, yaitu data kedua dan berfungsi sebagai data pendukung dalam memecahkan pokok permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

3.2.5. Populasi

Pengertian populasi menurut Sugiyono (2015:61) adalah Wilayah generalisasi yang terdidi atas: objek/subyek yg mempunyai kuanitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Pada penelitian yang dilakukan penulis, pengumpulan data primer adalah sistim populasi.Sistim populasi dipilih karena yang dijadikan responden pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato adalah Pegawai Negeri Sipil yang betul-betul mengetahui seluk-beluk proses anggaran yaitu sebanyak 13 orang yang terdiri dari Kepala BKD 1 orang, Sekretaris BKD 1 orang, Kabid 3 orang, dan Kasubag 8 orang.

3.3. Metode Analisis

Untuk memecahkan masalah pokok dan membuktikan hipotesis, maka digunakan metode analisis regresi sederhana,menurut sugiono (2015:261), Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel

dependen. variabel independen dalam hal ini pertanggungjawaban anggaran (X) dan variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja (Y). Adapun persamaan regresinya sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X$$

Dimana :

3.4.	Y α β X	= Akuntabilitas kinerja = Nilai konstan atau nilai tetap = Parameter (koefisien variabel) = Pertanggungjawaban Anggaran
------	-----------------------------------	--

Peng

ujian Hipotesis

Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, yakni :

3.4.1. Pengujian Hipotesis secara Parsial

Uji koefisien regresi parsial dirancang untuk melihat apakah variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen jika variabel independen lainnya tetap konstan.

Pengujian hipotesis parsial dilakukan dengan uji-T. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (tingkat signifikansi) yang ditetapkan dalam penelitian ini dengan nilai probabilitas hasil survei. Jika Anda menetapkan tingkat signifikansi (nilai probabilitas) menjadi 0,05, kriteria pengujian hipotesis adalah sebagai berikut.

1. Jika nilai p hasil pencarian < nilai p peneliti (0,05), maka H_0 ditolak dan diterima hipotesis alternatif.
- 2 Jika *probability value* hasil penelitian >*probability value* peneliti (0,05) , maka H_0 diterima dan hipotesis alternatif ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejak terbentuknya Kabupaten Pohuwato sebagai daerah pemekaran pada bulan Oktober 2003, pengelolaan keuangan Kabupaten Pohuwato masih dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah mini yang merupakan pelimpahan sebagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Boalemo sebagai kabupaten induk. Organisasi keuangan daerah ini adalah Badan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pohuwato dan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Seiring dengan perkembangan waktu dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 01 Tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Daerah Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Kabupaten Pohuwato, perbedaan dengan periode sebelumnya adalah sejak tahun 2013, Badan Pendapatan tidak lagi menjadi bagian dalam organisasi dan tata kerja Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah. Bidang pendapatan berubah status berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah.

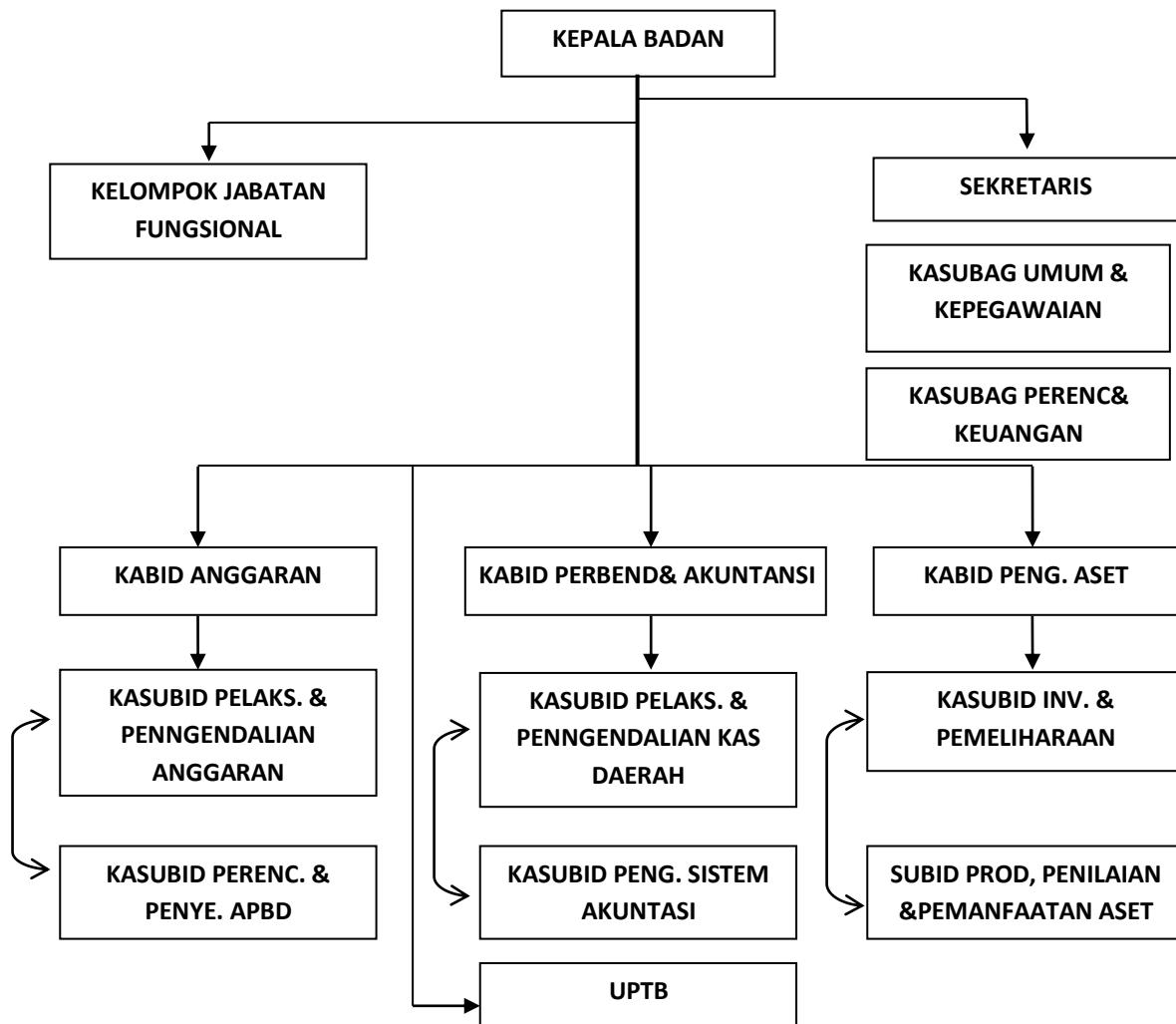
Kepemimpinan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah sudah tiga mengalami pergantian, dimana pada periode 2012 sampai sekarang di pimpin oleh Drs. Ahmad Djuna, dan dalam perjalanan Badan Pengelolaan dan Keuangan Daerah, prestasi yang yang diraih adalah penghargaan berprestasi berdasarkan kinerja keuangan dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, Opini Wajar Tampak Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKD) dari BPK RI tahun 2013 dan tahun 2014, Rangkin 2 SKPD berkinerja tinggi, terbaik III penataan Kantor dan Halaman dan beberapa prestasi di bidang olahraga dan seni budaya.

Adapun struktur organisasi BKD Kabupaten Pohuwato adalah sebagai berikut.

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO



4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Variabel dalam penelitian ini yaitu Pertanggungjawaban Anggaran (X) sedangkan variabel (Y) yaitu akuntabilitas kinerja pemerintah, adapun total pertanyaan/pernyataan sebanyak 15 item dan setiap item pertanyaan/ pernyataan direspon oleh 13 orang yang dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini dan selanjutnya masing-masing indikator dari setiap variabel akan dilakukan pendeskripsian.

Langkah awal untuk mendiskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan, selanjutnya dapat dibuatkan skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan/ pernyataan dengan terlebih dahulu menghitung rentang skalanya:

$$\text{Bobot terendah X item X jumlah responden} = 1 \times 1 \times 39 = 39$$

$$\text{Bobot tertinggi X item X jumlah responden} = 5 \times 1 \times 39 = 195$$

Dari perhitungan rentang bobot terendah sampai pada bobot tertinggi adalah:

$$\text{Rentang Skala} = \frac{195 - 39}{5} = 31,2$$

Tabel 4.1
Rentang Skala Pengukuran Terhadap Skor Item

Range	Kategori
163.9 - 195	Sangat besar
132.7 - 163.8	Besar
101.5 - 132.6	Sedang
70.3 - 101.4	Kecil
39 - 70.2	Sangat kecil

Sumber : Data Olahan 2022

Adapun deskripsi jawaban responden untuk setiap pertanyaan/pernyataan pada masing – masing indikator untuk setiap variabel adalah :

4.2.1 Tanggapan Responden pada Variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X)

Tabel 4.2
Indikator Jawaban Responden (x11)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	14	35.9	35.9	35.9
5	25	64.1	64.1	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Berdasarkan jawaban responden untuk indikator x11 ada sebanyak 14 responden yang memiliki jawaban setuju dengan jumlah persentase 35,9 %, sedangkan 25 orang responden yang beri jawaban sangat setuju dengan persentase 64,1 %.

Tabel 4.3
Indikator Jawaban Responden (x12)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	9	23.1	23.1	23.1
4	23	59.0	59.0	82.1
5	7	17.9	17.9	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Berdasarkan jawaban responden untuk indikator x12 ada sebanyak 9 responden yang memiliki jawaban netral dengan jumlah persentase 23,1 %, dan sebanyak 23 orang yang memiliki jawaban setuju dengan jumlah persentase 59,0 % serta sebanyak 7 responden yang memiliki jawaban sangat setuju dengan jumlah persentase 17,9 %.

Berdasarkan jawaban responden untuk indikator x13 ada sebanyak 28 responden yang memiliki jawaban setuju dengan jumlah persentase 71,8 %, dan sebanyak 11 responden yang memiliki jawaban sangat setuju dengan jumlah persentase 28,2 %.

Tabel 4.4
Indikator Jawaban Responden (x13)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	28	71.8	71.8	71.8
5	11	28.2	28.2	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Tabel 4.5
Indikator Jawaban Responden (x14)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	16	41.0	41.0	41.0
4	12	30.8	30.8	71.8
5	11	28.2	28.2	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Berdasarkan jawaban responden untuk indikator x14 ada sebanyak 16 responden yang memiliki jawaban netral dengan jumlah persentase 41,0 %, dan ada sebanyak 12 responden yang memiliki jawaban setuju dengan jumlah persentase 30,8 %. Serta terdapat 11 responden yang memiliki jawaban sangat setuju dengan jumlah persentase sebesar 28,2 %

Tabel 4.6
Indikator Jawaban Responden (x15)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	9	23.1	23.1	23.1
4	15	38.5	38.5	61.5
5	15	38.5	38.5	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Berdasarkan jawaban responden x15 terdapat sebanyak 9 responden yang memiliki jawaban netral dengan jumlah persentase sebesar 23,1 %, dan terdapat 15 responden yang memiliki jawaban setuju dengan persentase sebesar 38,5 %, serta terdapat 15 responden yang memiliki jawaban sangat setuju dengan persentase sebesar 38,5 %.

Tabel 4.7
Jumlah skor Jawaban responden terhadap pertanggungjawaban Anggaran

	Pertanggungjawaban Anggaran	x11	x12	x13	x14	x15
N	Valid	39	39	39	39	39
	Missing	0	0	0	0	0

Sum	815	181	154	167	151	162
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ber

dasarkan jawaban responden untuk variabel pertanggungjawaban Anggaran (X) dengan skor rata-rata 163 berada pada kategori besar.

4.2.2 Tanggapan Responden pada Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)

Tabel 4.8
Indikator Jawaban Responden (y11)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	8	20.5	20.5	20.5
4	11	28.2	28.2	48.7
5	20	51.3	51.3	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan 8 responden memiliki jawaban netral dengan persentase 20,5 %, dan 11 responden memiliki jawaban setuju dengan persentase sebesar 28,2% serta 20 responden lain memiliki jawaban sangat setuju dengan persentase 51,3%.

Tabel 4.9
Indikator Jawaban Responden (y12)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	10	25.6	25.6	25.6
4	24	61.5	61.5	87.2

Tabel 4.10
Indikator Jawaban Responden (y13)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	11	28.2	28.2	28.2
4	12	30.8	30.8	59.0
5	16	41.0	41.0	100.0
Total	39	100.0	100.0	
Valid 5	5	12.8	12.8	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan 10 responden memiliki jawaban netral dengan persentase 25,6 %, dan 24 responden memiliki jawaban setuju dengan persentase sebesar 61,5 % serta 5 responden lain memiliki jawaban sangat setuju dengan persentase 12,8 %.

Berdasarkan jawaban responden untuk indikator y13, terdapat sebanyak 11 responden yang memiliki jawaban netral dengan persentase 28,2 % dan 12 responden memiliki jawaban setuju dengan persentase 30,8 % serta 16 responden lainnya memiliki jawaban sangat setuju dengan persentase 41,0 %

Berdasarkan jawaban responden untuk indikator y14, terdapat sebanyak 16 responden yang memiliki jawaban netral dengan persentase 41,0 % dan 12 responden memiliki jawaban setuju dengan persentase 30,8 % serta 11 responden lainnya memiliki jawaban sangat setuju dengan persentase 28,2 %

Tabel 4.12
Indikator Jawaban Responden (y15)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	17	43.6	43.6	43.6
4	14	35.9	35.9	79.5
5	8	20.5	20.5	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Indikator Jawaban Responden (y14)

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	16	41.0	41.0	41.0
4	12	30.8	30.8	71.8
5	11	28.2	28.2	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Berdasarkan jawaban responden untuk indikator y15, terdapat sebanyak 17 responden yang memiliki jawaban netral dengan persentase 43,6 % dan 14 responden memiliki jawaban

setuju dengan persentase 35,9 % serta 8 responden lainnya memiliki jawaban sangat setuju dengan persentase 20,5 %.

Tabel 4.13
Jumlah skor Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas Kinerja

	Akuntabilitas Kinerja	y11	y12	y13	y14	y15
N	Valid	39	39	39	39	39
	Missing	0	0	0	0	0
Sum		778	168	151	161	151
						147

Berdasarkan jawaban responden untuk variabel Akuntabilitas Kinerja (Y) dengan skor rata-rata 155,6 berada pada kategori besar.

4.3 Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

4.3.1 Analisis Data

Analisis regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran (X) secara parsial terhadap Akuntabilitas kinerja (Y). Perhitungan statistik dalam analisis regresi linear sederhana dapat dilihat pada tabel dibawah ini (Selengkapnya ada pada lampiran)

Tabel 4.14 Hasil Analisis Regresi linear Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.634	4.439		1.720	.094
Pertanggungjawaban Anggaran	.589	.212	.416	2.782	.008

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Model persamaan regresi yang dapat di gambarkan dari hasil tersebut dalam bentuk persamaan regresi standardized adalah sebagai berikut :

$$Y = 7.634 + 2.782 X$$

Dari persamaan regresi diatas dapat di interpretasikan sebagai berikut :

Konstanta (a) yang didapatkan nilai sebesar 7.634 menggambarkan, tingkat Akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato tanpa dipengaruhi oleh faktor apapun termasuk Pertanggungjawaban Anggaran yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja diasumsikan sama dengan nol.

Koefisien regresi untuk variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X) artinya kontribusi Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato adalah positif atau setiap peningkatan Pertanggungjawaban Anggaran akan mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja sebesar 2.782.

Table 4.15 Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.416 ^a	.173	.151	2.005

a. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban Anggaran

Nilai koefisien determinasi (R^2) pada tabel di atas menunjukkan angka 0,173 memiliki makna bahwa 17,3% variasi naik turunnya variabel akuntabilitas kinerja (Y) mampu dijelaskan oleh variabel pertanggungjawaban Anggaran (X), Sedangkan sisanya sebesar 82,7% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.2. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk menguji hipotesis pertama (H_1) yakni untuk melihat signifikansi pengaruh variabel Pertanggungjawaban Anggaran (X) terhadap akuntabilitas kinerja (Y).

Uji-t dilakukan untuk membandingkan nilai t_{tabel} dan nilai t_{hitung} pada taraf signifikansi 0,05. Jika nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} ($t_{hitung} > t_{tabel}$), maka hipotesis penelitian diterima. Sebaliknya jika nilai Hitungan lebih kecil dari nilai tabel ($t_{hitung} < t_{tabel}$), sehingga hipotesis pencarian ditolak. Harga t-tabel = 5%, harga t-tabel adalah 2.042.

Uji signifikansi juga dapat dilihat dari nilai signifikansi koefisien regresi. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis penelitian dapat diterima. Sebaliknya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak.

a. Pengujian Hipotesis Pertama (H_1)

H_1 : Pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato

Berdasarkan perhitungan analisis regresi sederhana diperoleh nilai t_{hitung} 2.782. Nilai ini lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar 2.042 (t_{hitung} 2.782 > t_{tabel} 2,042) yang berarti bahwa variabel pertanggungjawaban Anggaran berpengaruh Positif terhadap akuntabilitas kinerja, hal ini juga didukung oleh nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih rendah dari tingkat signifikansi yang diberikan sebesar 0,05. Jadi bisa dikatakan hipotesis penelitian yang menyatakan Pertanggungjawaban Anggaran (X) secara parsial mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah (Y) diterima.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang ada diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban anggaran (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti memberikan saran kepada para pemangku kepentingan dan calon peneliti sebagai berikut :

1. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwatoagar lebih mengawasi proses pertanggungjawaban Anggaran harus lebih ketat agar supaya tujuan atau target yang hendak dicapai dapat berjalan dengan lebih lancar dan terarah.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dalam bidang yang sama agar menambah variabel lain yang ikut mempengaruhi akuntabilitas kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Yunita, dan B. Hendra Puranto.2010.*Anggaran Berbasis Kinerja (Penyusunan Secara Komprehensif)*. Yogyakarta, UPP STIM YKPN.
- Anthony, Robert N., dan Vijay Govindarajan.2000.*Sistem Pengendalian Manajemen*, Terjemahan F.X Kurniawan Tjakrawala, Jakarta: Salemba empat.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Carlin, Tyrone M. 2004.*Output Based-Budgeting and the Management of Performance. MGSM Working Papers in Management*. Macquarie Graduate School of Management. Sydney.
- Darise, Nurlan, 2008, *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*, PT Indeks, Jakarta
- Darsono P dan Ari Purwanti. 2008. *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta :Mitra Wancana Media
Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi Edisi Tiga. Jakarta :SalembaEmpat.
- Deddi Nordiawan (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Fahmi, Irham. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Haruman, Tendi&Rahayu, Sri, 2007, *Penyusunan Anggaran Perusahaan*, Edisi kedua, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Kurniawan.2009.*Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan*. Skripsi dipublikasikan. Bandung:UPI
- LAN & BPKP. 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Munandar M, 2000 :“*Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*”, Yogyakarta : BPFE, Edisi 1.
- Nafarin,M.2007.*Penganggaran Perusahaan*. Jakarta:SalembaEmpat
- Peraturan Negara UU No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.

- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Statistika Untuk Penelitian*, Alfabeta: Bandung.
- Yuwono, Sony. dkk. 2007. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Score card*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan-peraturan :

Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan peraturan-peraturan terkait lainnya*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang *Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah*.

PP No 8/2006 tentang *Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja Kegiatan Pemerintah*.

Undang No. 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004,

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1

UU No 32/2004 tentang *Pemerintahan Daerah*

UU No. 15 Tahun 2004 tentang *Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan*

UU No. 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*,

Data Online :

<http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/handle/123456789/4516>

Lampiran 1 Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2021											
	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Okttober	November	Deseember			
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Observasi												
Ustiran Judui												
Penyusunan Proposal & Bimbingan												
Ujian Proposal												
Revisi Proposal												
Pengolahan Data & Bimbingan												
Ujian Skripsi												
Revisi Skripsi												

Kegiatan	Tahun 2022																								
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
Observasi																									
Usulan Judul																									
Penyusunan Proposal & Bimbingan																									
Ujian Proposal																									
Revisi Proposal																									
Pengolahan Data & Bimbingan																									
Ujian Skripsi																									
Revisi Skripsi																									



ABSTRACT

CICI SABU. E1119126. THE EFFECT OF BUDGETARY ACCOUNTABILITY ON THE PERFORMANCE ACCOUNTABILITY AT THE REGIONAL FINANCE AGENCY OF POHuwato REGENCY

The study aims to determine to what extent the effect of Budgetary Accountability on Performance Accountability at the Regional Finance Agency of Pohuwato Regency. The method used in this study is a survey research approach. It employs a questionnaire with a simple regression analysis tool. The results of this study indicate that budgetary accountability (X) has a positive and significant effect on performance accountability at the Regional Finance Agency of Pohuwato Regency.

Keywords: budget accountability, performance accountability



ABSTRAK

CICI SABU. E1119126. PENGARUH PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu melalui pendekatan penelitian survey dengan menggunakan kuesioner dengan alat analisis regresi sederhana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban anggaran (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.

Kata kunci: pertanggungjawaban anggaran, akuntabilitas kinerja



KUESIONER PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui “*Pengaruh pertanggungjawaban anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato*” untuk maksud tersebut kami mohon kiranya bapak/ibu atas kesediaannya menjawab item pertanyaan/pernyataan yang ada secara jujur dan objektif.

I. Petunjuk Pengisian

1. pilih salah satu jawaban yang disediakan, yang dianggap tepat dengan memberi tanda silang (X)
2. mohon diisi sesuai dengan jujur dan objektif

II. Identitas Peneliti

Nama peneliti : Cici Sabu
Pekerjaan : Mahasiswa Universitas Ichsan Gorontalo

Petunjuk Pengisian Angket

Dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai atas pernyataan-pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan tanda (X).

Jika menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada pilihan yang paling mendekati. Jawaban dituangkan dalam bentuk skala berupa angka antara 1 s.d. 5, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin setuju responden terhadap materi pertanyaan/pernyataan.

Skor jawaban adalah sebagai berikut :

Keterangan	(STS) Sangat Tidak Setuju	(TS) Tidak Setuju	(N) Netral	(S) Setuju	(SS) Sangat Setuju
Skor	1	2	3	4	5

PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN (X)

Pernyataan	Penilaian				
	STS (1)	TS (2)	N (3)	S (4)	SS (5)
1. Setiap SKPD membuat laporan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi					
2. Laporan keuangan SKPD dan Pemda yang dibuat sesuai dengan SAP yang terdiri dari LRA, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.					
3. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan menerbitkan laporan keuangan pemda untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada public					
4. Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD telah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan					
5. Dalam pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan APBD diterbitkan laporan keuangan pemda untuk diperiksa oleh BPK dan bentuk pertanggungjawaban kepada publik.					

Pernyataan	Penilaian				
	STS	TS	N	S	SS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Adanya keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan.					
2. Kejelasan sasaran anggaran suatu program harus dimengerti oleh semua aparat dan pemimpin					
3. Visi dan misi program perlu ditetapkan sesuai rencana strategik organisasi.					
4. Indikator kinerja perlu ditetapkan untuk setiap kegiatan atau program.					
5. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.					

“TERIMA KASIH”

Responder	Akuntabilitas Kinerja (Y)					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	4	2	3	4	5	21
2	5	5	4	4	4	21
3	4	4	4	3	3	19
4	5	4	3	5	5	21
5	5	3	3	5	4	20
6	5	4	4	5	4	22
7	5	4	4	5	4	22
8	5	4	4	5	4	22
9	4	4	5	3	4	20
10	4	4	5	3	4	20
11	5	4	5	3	4	20
12	5	4	5	3	5	22
13	5	4	5	3	5	22
14	5	4	5	4	5	23
15	5	4	5	4	3	21
16	4	4	5	5	4	22
17	4	4	4	5	3	20
18	4	5	5	5	4	23
19	4	4	5	3	4	20
20	5	4	5	3	5	22
21	3	3	4	3	3	16
22	5	4	5	4	5	23
23	3	4	5	4	3	19
24	5	3	4	3	3	18
25	5	4	5	4	3	21
26	3	3	3	3	3	18
27	5	4	3	3	3	19
28	3	4	4	3	5	22
29	5	3	5	4	3	18
30	5	3	3	4	3	19
31	5	4	3	5	3	21
32	4	5	4	5	4	20
33	3	5	3	5	3	21
34	4	5	4	3	3	15
35	3	3	3	3	3	17
36	5	3	4	3	3	17
37	3	4	3	4	3	18
38	5	3	3	4	3	16
39	3	3	3	4	3	16

Lampiran 5 Jawaban Responden

Responden	Pertanggungjawaban Anggaran (X)					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1	4	5	4	4	4	21
2	5	3	4	3	3	18
3	4	4	4	5	5	22
4	5	3	4	5	4	21
5	5	3	4	5	4	21
6	5	4	4	5	4	21
7	5	4	4	5	4	22
8	4	3	4	5	4	22
9	4	3	4	3	4	18
10	4	3	4	3	4	18
11	5	4	4	3	4	18
12	5	4	4	3	5	21
13	5	4	5	4	5	23
14	5	4	5	4	3	21
15	5	4	5	4	3	21
16	4	5	4	5	3	21
17	4	5	4	5	4	22
18	4	5	4	5	4	22
19	4	3	4	3	4	18
20	5	4	4	3	5	21
21	5	4	4	3	5	21
22	5	4	5	4	5	23
23	5	4	5	4	3	21
24	5	4	4	3	5	21
25	5	4	5	4	5	23
26	4	3	4	3	4	18
27	5	4	4	3	5	21
28	5	4	4	3	5	21
29	5	4	5	4	3	21
30	5	4	5	4	3	21
31	5	4	5	4	3	21
32	4	5	4	5	4	22
33	4	5	4	5	4	22
34	4	3	4	3	4	18
35	4	4	4	3	5	21
36	5	4	4	3	5	21
37	5	4	5	4	5	23
38	5	4	5	4	3	21
39	5	4	5	4	3	21

Lamiran Hasil Olahan Data SPSS

Regression

		Notes
Output Created		
Comments		17-Jun-2022 09:27:22
Input	Active Dataset Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File	DataSet0 <none> <none> <none>
Missing Value Handling	Definition of Missing Cases Used	User-defined missing values are treated as missing. Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax	REGRESSION /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X.	
Resources	Processor Time Elapsed Time Memory Required Additional Memory Required for Residual Plots	00:00:00.078 00:00:00.038 1548 bytes 0 bytes

[DataSet0]

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Pertanggungjawaban Anggaran ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.416 ^a	.173	.151	2.00530

a. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban Anggaran

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	31.112	1	31.112	7.737	.008 ^a
Residual	148.786	37	4.021		
Total	179.897	38			

a. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban Anggaran

b. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	7.624	4.439		1.720	.094
Pertanggungjawaban Anggaran	.589	.212	.416	2.782	.008

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja

Statistics						
	Y11	Y12	Y13	Y14	Y15	Akuntabilitas Kinerja
N Valid	39	39	39	39	39	39
Missing	0	0	0	0	0	0
Sum	168.00	151.00	161.00	151.00	147.00	778.00

Frequency Table

Y11					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid 3	8	20.5	20.5	20.5	
4	11	28.2	28.2	48.7	
5	20	51.3	51.3	100.0	
Total	39	100.0	100.0		

Y12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	10	25.6	25.6	25.6
4	24	61.5	61.5	87.2
5	5	12.8	12.8	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Y13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	11	28.2	28.2	28.2
4	12	30.8	30.8	59.0
5	16	41.0	41.0	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Y14

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	16	41.0	41.0	41.0
4	12	30.8	30.8	71.8
5	11	28.2	28.2	100.0
Total	39	100.0	100.0	

Y15					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	3	17	43.6	43.6	
	4	14	35.9	35.9	43.6
	5	8	20.5	20.5	79.5
	Total	39	100.0	100.0	100.0

Akuntabilitas Kinerja					
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent	
Valid	15	1	2.6	2.6	2.6
	16	3	7.7	7.7	10.3
	17	2	5.1	5.1	15.4
	18	4	10.3	10.3	25.6
	19	4	10.3	10.3	35.9
	20	7	17.9	17.9	53.8
	21	6	15.4	15.4	69.2
	22	9	23.1	23.1	92.3
	23	3	7.7	7.7	100.0
	Total	39	100.0	100.0	

Statistics						
	X11	X12	X13	X14	X15	Pertanggungjawaban Anggaran
N	39	39	39	39	39	39
Valid	39	39	39	39	39	0
Missing	0	0	0	0	0	815.00
Sum	181.00	154.00	167.00	151.00	162.00	

Frequency Table**X11**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	14	35.9	35.9	35.9
5	25	64.1	64.1	100.0
Total	39	100.0	100.0	

X12

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	9	23.1	23.1	23.1
4	23	59.0	59.0	82.1
5	7	17.9	17.9	100.0
Total	39	100.0	100.0	

X13

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 4	28	71.8	71.8	71.8
5	11	28.2	28.2	100.0
Total	39	100.0	100.0	

X14

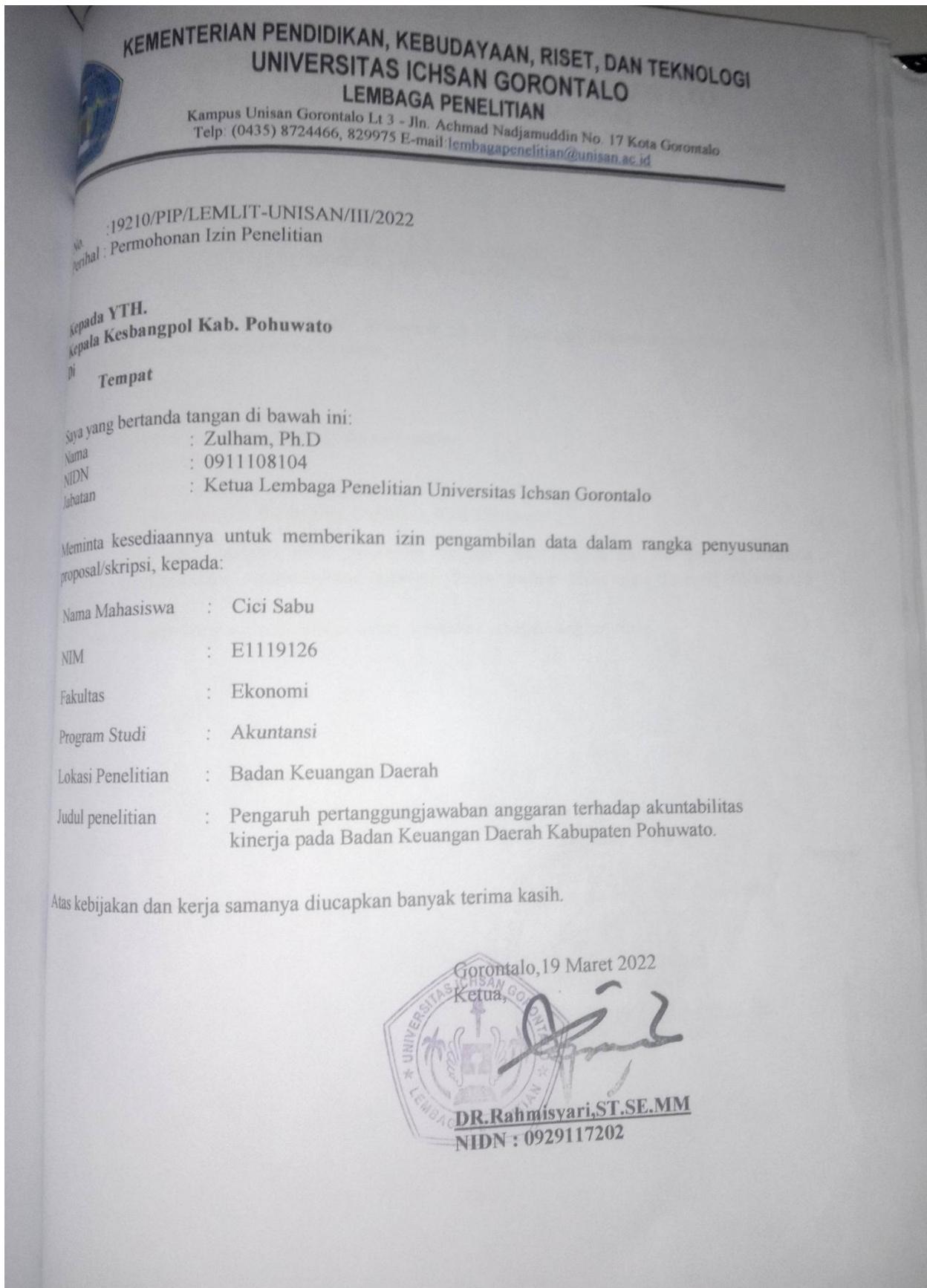
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	16	41.0	41.0	41.0
4	12	30.8	30.8	71.8
5	11	28.2	28.2	
Total	39	100.0	100.0	100.0

X15

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	9	23.1	23.1	23.1
4	15	38.5	38.5	61.5
5	15	38.5	38.5	
Total	39	100.0	100.0	100.0

Pertanggungjawaban Anggaran

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 18	7	17.9	17.9	17.9
21	20	51.3	51.3	69.2
22	7	17.9	17.9	87.2
23	5	12.8	12.8	
Total	39	100.0	100.0	100.0





PEMERINTAH KABUPATEN POHuwATO
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. MH. Thamrin Kompleks Blok Pion Perkantoran Telp. (0433) 210040 Fax. (0443) 210080

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 900/BKD/248/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

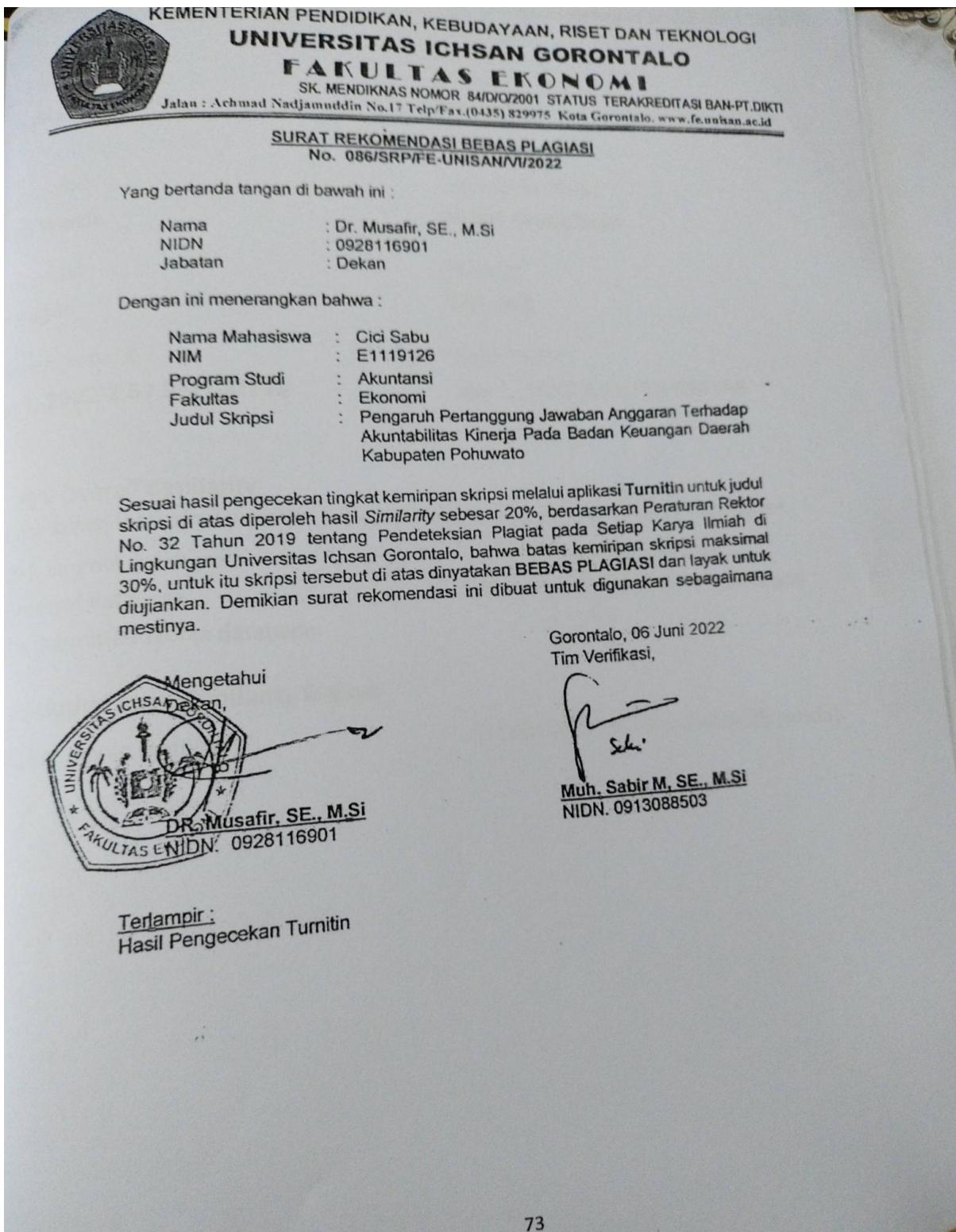
Nama : CICI SABU
 Nim : E1119126
 Fakultas : Ekonomi, Universitas Ichsan Gorontalo
 Jurusan : Akuntansi
 TTL : Gorontalo, 16 Februari 2000
 Alamat : Desa Buntulia Barat, Kec. Duhiadaa, Kab. Pohuwato

Benar-benar telah melaksanakan penelitian dengan judul **Pengaruh Pertanggungjawaban Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato.**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Marisa, 12 April 2022





turnitin

Similarity Report ID: id:25211:18006111

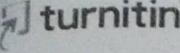
PAPER NAME	AUTHOR
skripsi cici fix.docx	CICI SABU
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
8190 Words	56507 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
57 Pages	141.3KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Jun 1, 2022 2:59 PM GMT+8	Jun 1, 2022 3:03 PM GMT+8

● **20% Overall Similarity**
The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 20% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● **Excluded from Similarity Report**

- Bibliographic material
- Small Matches (Less than 25 words)

 turnitin

Similarity Report ID: oid:25211:18006111

● 20% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 20% Internet database
- Crossref database
- 2% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Category	Similarity (%)
1	scribd.com	Internet	2%
2	tartarush.blogspot.com	Internet	1%
3	123dok.com	Internet	1%
4	elibrary.unikom.ac.id	Internet	1%
5	eprints.umpo.ac.id	Internet	<1%
6	sahnabintang.blogspot.com	Internet	<1%
7	jurnal.iaingorontalo.ac.id	Internet	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id	Internet	<1%

Turnitin Similarity Report ID: id:25211:1800611		
9	media.neliti.com Internet	<1%
10	repository.uhn.ac.id Internet	<1%
11	repository.ub.ac.id Internet	<1%
12	adoc.pub Internet	<1%
13	robyhadiputra.blogspot.com Internet	<1%
14	download.garuda.ristekdikti.go.id Internet	<1%
15	es.scribd.com Internet	<1%
16	LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-08-16 Submitted works	<1%
17	jurnal.unigo.ac.id Internet	<1%
18	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
19	ojs.stie-tdn.ac.id Internet	<1%
20	repository.um-palembang.ac.id Internet	<1%

turnitin

Similarity Report ID: old.25211.18006111

21	repository.usu.ac.id Internet	<1%
22	zahraekoputri.blogspot.com Internet	<1%
23	fr.scribd.com Internet	<1%
24	setkpid.bantenprov.go.id Internet	<1%
25	repository.ekuitas.ac.id Internet	<1%
26	ndangkusnadi.wordpress.com Internet	<1%
27	repository.unhas.ac.id Internet	<1%

Sources overview

CURRICULUM VITAE**1. Identifikasi Pribadi**

Nama	:	Cici Sabu
NIM	:	E1119126
Tempat/Tgl Lahir	:	Gorontalo, 16 Februari 2000
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Angkatan	:	2019
Fakultas	:	Ekonomi
Program Studi	:	AKuntansi
Agama	:	Islam
Alamat Asal	:	Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhidaaa

2. Riwayat Pendidikan

1. Menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SD Inpres Teratai pada tahun 2012.
2. Kemudian melanjutkan kejenjang selanjutnya yakni di SMP Negeri 01 Marisa dan lulus pada tahun 2015.
3. Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya yakni di SMA Negeri 01 Buntulia dan lulus pada tahun 2018.
4. Dan Kemudian melanjutkan kejenjang berikutnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ichsan Gorontalo (STIE Ichsan Pohuwato) dengan jurusan Akuntansi kemudian pada tahun 2019 dikonfersi ke Universitas Ichsan Gorontalo dan Alhamdulillah pada tahun 2022 telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Ichsan Gorontalo.